

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Implementasi
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan
di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Politik (S.IP) dalam Bidang Ilmu Politik**



Oleh :

MASLAHATUL HABIBAH TAMI

NIM. I01214002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPE SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
JULI 2018**

**PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Maslahatul Habibah Tami

NIM : I01214002

Program Studi : Ilmu Politik

yang berjudul **:KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi
Implementasi Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Banyutengah
Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapat gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 10 Juli 2018

Yang menyatakan



Maslahatul Habibah Tami

NIM I01214002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh

Nama : Maslahatul Habibah Tami
NIM : I01214002
Program Studi : Ilmu Politik

yang berjudul: **KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik dan Ilmu Sosial dalam Bidang Ilmu Politik

Surabaya, 19 Juli 2018

Pembimbing



Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si

NIP: 197202062007101003

PENGESAHAN

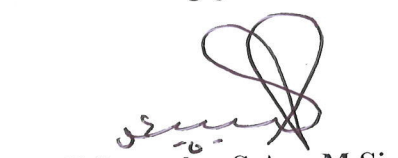
Skripsi oleh Maslahatul Habibah Tami dengan judul **KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 19 Juli 2018.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I


Dr. Khoirul Yahya, S.Ag., M.Si.
NIP. 197202062007101003

Penguji II


Andi Suwarko, S.Ag., M.Si.
NIP. 197411102003121004

Penguji III


Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si.
NIP. 19690971994032001

Penguji IV



Moh. Ilyas Rolis, S.Ag., M.Si.
NIP. 197704182011011007

Surabaya, 25 Juli 2018

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dekan


Prof. Akh. Muzakki, Grad. Dip. SEA., M.Ag., M.Phil., Ph.D.
NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Maslahatul Habibah Tami
NIM : I01214002
Fakultas/Jurusan : FISIP/Ilmu Politik
E-mail address : maslahatulhabibahtami60@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2018

Penulis

Maslahatul Habibah Tami

ABSTRAK

Maslahatul, 2018 KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

Kata Kunci: *Kebijakan Pemerintah, Penanggulangan Kemiskinan, PNPM Mandiri Pedesaan*

Tujuan Penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan: 1. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. 2. Mengetahui Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Penelitian dilakukan menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *trianggulasi sumber* yang berarti peneliti akan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Teori yang digunakan adalah: 1. Teori Kebijakan dari Riant (ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses). 2. Teori Implementasi dari Merile S. Grindle (isi kebijakan, dan lingkungan kebijakan) mengenai partisipasi masyarakat 3. Teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Uphoff, Cohen, dan Goldsmith: (perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil atau pemanfaatan dan evaluasi).

Hasil penelitian menyatakan bahwa: 1. Impelementasi PNPM MP di Desa Banyutengah telah berhasil karena melihat kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan dari PNPM itu sendiri. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Banyutengah terbukti terlaksana dengan baik. Masyarakat Desa Banyutengah secara aktif ikut terlibat dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan, menikmati hasil dan Proses Evaluasi. Maka terlihat bahwa PNPM memiliki nilai plus dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakat Desa Banyutengah dapat dikatakan bahwa partisipasinya tergolong *Partisipasi Mandiri*. 2. Dampak PNPM MP pada masyarakat desa banyutengah jika dilihat dari segi Sosial-Ekonomi adalah: Ekonomi: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pergerakan pada angka Pengangguran pada masyarakat Desa Banyutengah, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat desa, peningkatan penghasilan perbulan antara sebelum dengan setelah adanya PNPM MP, dengan melihat usaha-usaha kecil masyarakat Desa Banyutengah dari penjual es tebu, berdagang kambing, berdagang krudung, modal pertanian dan untuk modal usaha lainnya. Sosial: memberdayakan masyarakat dengan cara mendorong partisipasi masyarakat untuk bergotong royong, menggali kreatifitas masyarakat dan lain-lain.

upaya menanggulangi kemiskinan sampai saat ini masih dinilai belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Selama ini banyak program dari pemerintah yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan pada masyarakat, seperti : pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), Raskin, Kompensasi BBM, dan lain-lain. Namun, dari program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya dan belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia serta dinilai kurang efektif, karena masyarakat hanya menerima bantuan langsung dan tidak ada partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kondisi kehidupan mereka.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat martabat keluarga miskin adalah dengan pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting karena memberikan perspektif positif terhadap masyarakat miskin. Orang miskin tidak dipandang sebagai orang yang serba kekurangan (misalnya kurang makan, kurang pendapatan, kurang sehat dan kurang dinamis) dan obyek pasif penerima pelayanan belaka. Melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Oleh sebab itu, upaya pemerintah mengurangi kemiskinan terus menerus dilakukan, dan kini yang sedang dikembangkan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat untuk masyarakat miskin perkotaan dan juga

keterlambatan dalam pengembalian dana pinjaman atau pinjaman bergulir, selain itu peran aktif masyarakat juga mempengaruhi kesuksesan pada program pemerintah ini, jika masyarakatnya tidak mau tahu tentang program tersebut maka akan sangat mudah dimanfaatkan oleh golongan tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dengan begitu, dana yang disalurkan oleh pemerintah tidak akan sesuai sasaran, dan hal itu akan menjadikan masyarakat lebih menderita karna akan terdaji ketimpangan sosial yang nyata, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin.

Hal ini menunjukkan pada proses PNPM MP dinilai belum efektif, dengan masalah yang ada diatas penulis tertarik untuk mengamati kebijakan pemerintah melalui PNPM MP yang ada di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dengan melihat implementasi program yang ada di desa tersebut, serta ingin mengetahui dampak dari PNPM MP. Maka tema yang menjadi landasan penulis untuk penelitian kali ini adalah: **“KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)”**

memenuhi hak-hak dasar dan perbudakan, perlakuan seseorang atau sekelompok dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Artinya, masalah kemiskinan dilihat bahwa kebutuhan masyarakat itu bermacam-macam sehingga masalah kemiskinan manusia dipandang dan berbagi segi. Menurut Smeru dalam Soeharto (2005) menyatakan dimensi kemiskinan sebagai berikut:

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
- b. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, pant bersih dan transportasi).
- c. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
- d. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal.
- e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam.
- f. Ketidakterlibatkan dalam kegiatan sosial masyarakat.
- g. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencarian yang berkesinambungan.
- h. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

Pemantauan dan pengawasan PNPM Mandiri dilakukan untuk menjadi pelaksanaan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan program. PNPM Mandiri menerapkan sistem pemantauan dan pengawasan sebagai berikut:

- 1) Pemantauan dan Pengawasan Partisipatif oleh Masyarakat. mulai dari perencanaan partisipatif hingga pelaksanaan PNPM Mandiri di tingkat desa sampai kabupaten atau kota.
- 2) Pemantauan dan Pengawasan oleh Pemerintah. Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang dan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan PNPM Mandiri dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku serta dana dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program
- 3) Pemantauan dan Pengawasan oleh Konsultan dan Fasilitator. Pemantauan dan pengawasan ini dilakukan secara dari tingkat nasional, regional, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan dan desa atau kelurahan. kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan memanfaatkan sistem informasi pengendalian program dan kunjungan rutin ke lokasi program. Pengawasan

sebagai tolok ukur atas hasil berkelanjutan yang telah dicapai. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini khususnya tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) antara lain:

1. Wismoyo Ade Zaputro, Dengan Judul Skripsi “*Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang*” dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui makna pemberdayaan, mengetahui tahapan implementasi kebijakan PNPM mandiri perdesaan, dan untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan program PNPM mandiri perdesaan terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa tahap dalam proses pelaksanaan program PNPM Mandiri di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang yaitu tahap pertama, pemberian sosialisasi kepada masyarakat dari tingkat kecamatan, desa dan khusus perempuan. Tahap kedua, Perencanaan dan penetapan prioritas usulan sesuai dengan gagasan yang disampaikan oleh masyarakat. Tahap ketiga penjangingan aspirasi masyarakat dalam mencari program yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Tahap keempat yaitu proses pelaksanaan program PNPM Mandiri.

Dampak program PNPM terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan sudah signifikan baik dalam

peningkatan produktivitas, pendapatan petani maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan PNPM mandiri di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang menunjukkan keberhasilan dan kriteria-kriteria dengan rata-rata baik.¹⁹

2. Hidayat, Sarif “*Dampak Sosial Ekonomi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mp) Terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)*” hasil penelitian menunjukkan bahwa: Program pemerintah terkait dengan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Dlingo, sudah mempunyai efektifitas program bagi masyarakat di Desa Dlingo. Misalnya, dalam hasil temuan saya di lapangan bahwa di salah satu dusun yaitu Dusun Kebosungu I ada seorang pelopor yang bisa membangun masyarakatnya untuk bekerja sebagai karyawannya di rumah produksitas. Setelah mengikuti pelatihan menjahit yang difasilitasi oleh PNPM – MP seorang pelopor yang bernama Ibu Sukirwan memiliki inisiatif mengembangkan usaha rumah produksi tas, dan si pelopor bisa membantu masyarakat di Dusun Kebosungu I untuk bekerja sebagai karyawan pembuat tas tersebut dan sebagian besar dari masyarakat yang bekerja sebagai karyawan Ibu Sukirwan mengikuti pelatihan menjahit. Akan tetapi, keberhasilan PNPM – MP yang

¹⁹ Ade Zaputro, Wismoyo Skripsi “Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, SKRIPSI Jurusan, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar 2015

juga diadakan musrembang untuk mendukung berbagai kegiatan pemberdayaan, yang di hadiri oleh Camat, Perwakilan Bappeda Kabupaten Bangkalan, Muspika Kecamatan Geger serta Peserta Musrenbangcam terdiri dari delegasi desa yang terdiri dari Kades, BPD, LPMD dan Tokoh Perempuan, serta Kepala UPT/UPTD/Dinas terkait yang ada dilingkup Kecamatan serta semua Kasi kantor Kecamatan dan Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari Dapil Geger. (3) Kondisi SDM dalam pelaksanaan PNPM di Kecamatan Geger sangat mendukung, karena yang terlibat dalam program ini rata-rata memiliki tingkat pendidikan tinggi. Seperti dalam merencanakan pembangunan dan pemberdayaan selama ini yang terlibat adalah Camat, Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK), Tim Verifikasi (TV), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Badan Pengawas UPK (BP-UPK), Fasilitator Kecamatan, Pendamping Lokal (PL), Tim Pengamat, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Setrawan Kecamatan. Hal ini juga dapat dukungan dari sikap masyarakat terhadap kegiatan PNPM hal ini bisa dilihat seperti aktifnya masyarakat dalam mengikuti kegiatan usaha ekonomi produktif maun kegiatan simpan pinjam perempuan yang dikuti oleh 364 orang. (4) Hambatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui PNPM di Kecamatan. Geger Kabupaten Bangkalan adalah kurangnya sosialisasi dan informasi dari Satker Kabupaten (Bapedda dan

- c. Tepat target, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. apakah target dalam kondisi siap diintervensi atau tidak, dan apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya.
- d. Tepat lingkungan, lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi lingkungan internal kebijakan yang berkaitan dengan interaksi diantar perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. dan lingkungan eksternal kebijakan yang berkaitan dengan persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan.
- e. Tepat proses, terdiri atas tiga proses, yaitu Policy Acceptance, publik memahami kebijakan sebagai aturan dan pemerintah memahaminya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Policy adoption, publik menerima kebijakan sebagai aturan dan pemerintah menerimanya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Strategic Readiness, publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, dan birokrat siap menjadi pelaksana kebijakan

2. Teori Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencakup: 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan; 2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sebagai

data kualitatif harus dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang disampaikan oleh informan setelah dianalisis dirasa kurang memuaskan, maka peneliti akan melakukan wawancara kembali dilain waktu untuk melanjutkan pertanyaan yang kurang terjawab, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang lebih kredibel.

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclutions).

1. Pengumpulan Data Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. 2. Reduksi Data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,

- 4) *Kecukupan referensi* : Bahan-bahan yang tercatat atau terekam dapat digunakan sbagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

Tabel 3.2

Jadwal Penelitian

No	Uraian kegiatan	Waktu				
		Nov	Des	Jan	Feb	Mart
1.	Tahap Persiapan Penelitian:					
	a. Penyusunan dan pengajuan judul					
	b. Penyusunan instrumen					
	c. Pengajuan proposal					
No	Uraian Kegiatan	Waktu				
		Apr	Mei	Juni	Juli	
1.	Tahap Pelaksanaan:					
	a. Pengumpulan data					
	b. Analisis dan pengolahan data					
3.	Tahap Penyusunan Laporan :					
	a. Menyusun laporan hasil penelitian					
	a. Seminar penelitian					

Peningkatan Ketekunan: peneliti melakukan penggalan data secara tekun dengan tujuan memperoleh data yang benar. *Triangulasi sumber: peneliti* Membandingkan data hasil pengamatan dari dokumen PNPM dengan hasil wawancara. 2. Membandingkan apa yang dikatakan informan ketika diwawancara di tempat umum dengan apa yang dikatakan informan di rumahnya sendiri. 3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang peneliti dapatkan ketika observasi. 4. Membandingkan pendapat masing-masing informan, dari kepala desa, pejabat desa, pengurus UPK, masyarakat umum, penerima dana PNPM, ketua kelompok simpan pinjam perempuan, pengurus PNPM. sehingga peneliti dapat menyimpulkan dengan baik data yang telah diperoleh. *Kecukupan referensi:* peneliti mencatat apa yang diutarakan oleh inorman dan merekamnya dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kemudian langkah selanjutnya yaitu: interpretasi penelitian, yaitu melakukan kajian penemuan lapangan dengan dasar oprasional yang telah ditentukan sejak awal, kemudian melihatnya scara teoritis.

Dalam hal ini teori yang relevan adalah Merile S. Grindle (dalam subarsono) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencangkup : 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan; 2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, 3) sejauhmana perubahan yang

kelompok telah selesai dilakukan, maka nilai itu akan diakumulasikan dalam sidang pleno untuk menentukan usulan mana yang akan menempati ranking teratas setelah dilakukan penilaian.

Setelah mendapatkan urutan prioritas pelaksanaan program sesuai ranking beserta dengan berapa alokasi dana yang dibutuhkan, lalu disesuaikan dengan dana yang diterima oleh Kecamatan setelah dana tersebut dipotong oleh Dana Operasional. Dengan cara perangkingan tersebut masyarakat tidak lagi memiliki rasa kecemburuan sosial jika program yang diusulkan tidak disetujui, karena seluruh anggota forum berhak menyuarakan pendapatnya masing-masing.

Setelah diadakan rapat dikecamatan, Kepala Desa Banyutengah akan mengadakan musyawarah di Desa Banyutengah dengan mengundang Ketua RT dari RT 1 sampai RT 8, Ketua RW 1 sampai RW 4, Ketua Organisasi IPPNU, Karang Taruna, Aisiyah, Fatayat, Muslimat, dan Perangkat Desa. Pernyataan dari bapak fandholi selaku kepala desa :

...setelah ada rapat dikecamatan, saya langsung agendakan untuk musyawarah dengan masyarakat secara terbuka, tujuannya agar saya dapat mengetahui apa saja keluhan dan keinginan masyarakat. saya mengundang ketua RT,RW kemudian dari RT itu akan menyebar luaskan undangan kepada warganya sehingga undangan tersebut bersifat umum dan terbuka untuk siapapun. Semua warga kan memang berhak untuk

masyarakat desa cenderung memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Mereka akan dapat menyelesaikan berbagai pekerjaan atas dasar gotong royong atau swadaya meskipun dengan dana yang terbatas, mereka akan senantiasa mampu dan berhasil menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan fisik yang harusnya menghabiskan biaya mahal.

Biasanya untuk fasilitas umum yang ada di Desa seperti tempat ibadah, balai desa, polindes, sekolah dan lainnya selalu dikerjakan bergotong royong. Kenyataan seperti ini menunjukkan bahwa untuk mengarahkan masyarakat desa berpartisipasi dalam pembangunan desanya tidak semata-mata tergantung pada aspek anggaran, namun kepemimpinan seseorang juga merupakan faktor yang ikut menentukan tingkat partisipasi masyarakat desa. Artinya kepala desa beserta perangkatnya harus benar-benar merakyat secara jujur, transparan, akuntabel dan religius. Dengan demikian akan memperoleh simpati dari masyarakat dan akan cenderung lebih mudah mengarahkan guna menyumbangkan tenaga mereka dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di desanya.

Partisipasi masyarakat Desa Banyutengah Kecamatan Panceng dalam tahap pelaksanaannya sebagai anggota proyek (tenaga) mereka senantiasa bergotong royong dalam pengerjaannya, masyarakat melakukannya dengan sukarela dengan

hasilnya, sedangkan ada sebagian pihak yang menginginkan keuntungan banyak, contohnya jika proyek tersebut diberikan kepada pemborong maka pengerjaannya tidak akan maksimal. Jika hal tersebut terjadi maka itu merupakan suatu kebijakan yang menyimpang dari tujuan awal program tersebut.

Selain tidak memberikan kemandirian kepada masyarakat langkah tersebut juga dapat menutup keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat, karena masyarakat hanya bisa berpartisipasi sebagai pelaksana proyek. Namun hal tersebut tidak berlaku pada Desa Banyutengah karena sejak tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap menikmati hasil hingga tahap evaluasi masyarakat selalu dilibatkan.

Pelaksanaan PNPM di Desa Banyutengah telah memaksimalkan keterlibatan masyarakat. Masyarakat sebelumnya tidak pernah merencanakan, memimpin dan menyosialisasikan program seperti tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK). PNPM memang sangat memudahkan masyarakat untuk pelaksanaan diberikan kewenangan secara penuh kepada masyarakat, karena masyarakat sendiri yang tahu kebutuhan mereka. PNPM dinilai telah sangat transparan dalam pengelolaan karena masyarakat yang menentukan maka pengawasan menjadi lebih mudah karena masyarakat tahu berapa harga bahan-bahan dsb.

yaitu pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. program ini mampu membuat masyarakat berusaha lebih baik untuk meningkatkan taraf hidupnya. PNPM mandiri berhasil menciptakan masyarakat yang kritis dalam proses formulasi penetapan sebuah program, kemudian masyarakat senantiasa melakukan gotong royong dalam perbaikan infrastruktur dan dalam kegiatan-kegiatan lainnya, masyarakat memiliki tanggung jawab besar yang terlihat dari keseriusannya dalam proses pengelolaan. hal itulah yang membedakan antara program pemerintah lain dengan PNPM Mandiri Pedesaan. Point penting dalam PNPM MP ini memang ditekankan pada pemberdayaan masyarakat.

Dengan partisipasi masyarakat Desa Banyutengah yang antusiasme keterlibatan masyarakatnya dalam tahapan pembangunan prasarana lingkungan menunjukkan bahwa masyarakat sudah melakukan kerjasama yang baik dengan pemerintah sebagai penggagas adanya program PNPM MP maka ada dampak yang dirasakan dari proses partisipasi tersebut yakni pada bidang kesejahteraan, dengan adanya program PNPM MP pada infrastruktur masyarakat merasa senang dan diuntungkan karena pada prosesnya selalu ada pendampingan dari pihak kecamatan maka walaupun ada kendala bisa ditangani dengan baik. Hasil dari pembangunan juga berkualitas baik karena masyarakat sendiri yang mengerjakan tanpa dialihkan kepada pemborong yang cenderung mencari keuntungan saja.

Selain itu pada program PNPM MP lainnya yang murni beranggotakan perempuan juga dirasa sangat membantu masyarakat

5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi
6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Delapan indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator "kebutuhan psikologis" (psychological needs) keluarga, dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:

1. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
4. Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah.
5. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
6. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
7. Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin.
8. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

membandingkan sebelum mendapatkan dana pinjaman dan setelah mendapatkan dana pinjaman dari program Simpan Pinjam Perempuan. Deskripsi Pendapatan Masyarakat Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik :

a. Sebelum Adanya Program PNPM Mandiri Pedesaan

Pengangguran pada masyarakat Desa Banyutengah Tahun 2009 ada 168 orang dari jumlah penduduk 3.065, th 2010 ada 105 orang dari jumlah penduduk 2998, th 2011 ada 128 orang dari jumlah penduduk 3.065, th 2012 ada 125 orang dari jumlah penduduk 3.190, th 2013 ada 115 orang dari jumlah penduduk 3.230, th 2014 ada 115 orang dari jumlah penduduk 3.331, tahun 2015 ada 102 orang dari jumlah penduduk 3.298.

Dari data tersebut diketahui bahwa pada tahun 2009 ke th 2010 terdapat penurunan angka pengangguran sebesar 63 orang, hal itu juga dipengaruhi oleh angka jumlah penduduk yang berkurang sebesar 67 orang. pada tahun 2010 ke th 2011 terdapat peningkatan pengangguran sebesar 23 orang, namun hal itu juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang juga meningkat/bertambah dari tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar 67 orang, pada tahun 2011 ke 2012 terdapat penurunan angka pengangguran sebesar 3 orang, dan terdapat jumlah penduduk yang juga meningkat/bertambah dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 125 orang. pada tahun 2012 ke 2013 terdapat penurunan

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat desa, peningkatan penghasilan perbulan antara sebelum dengan sesudah adanya PNPM MP bahkan dari yang tidak memiliki penghasilan perbulan sebelum adanya PNPM MP berubah mendapatkan penghasilan perbulan setelah adanya PNPM MP, melalui usaha-usaha kecil masyarakat Desa Banyutengah dari penjual es tebu, berdagang kambing, berdagang krudung dan untuk modal usaha lainnya. Sosial: jika implementasi kebijakan itu dilihat dari partisipasi masyarakat, maka dapat dikatakan baik karena partisipasi masyarakat antusias dari proses perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil dan evaluasi selalu terlibat. Hal itulah yang dikatakan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui gotong royong, menggali kreatifitas masyarakat dll.

Dengan hasil penelitian diatas maka masyarakat Desa Banyutengah dapat dikatakan bahwa partisipasinya tergolong *Partisipasi Mandiri* karena Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dan dukungan teknis serta sumberdaya yang diperlukan yang terpenting, masyarakat juga memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada atau digunakan.

Mandiri karena Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dan dukungan teknis serta sumberdaya yang diperlukan yang terpenting, masyarakat juga memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada atau digunakan.

Terdapat klasifikasi *Jumlah Keluarga Tahapan Sejahtera di Desa Banyutengah* Tahun 2007 sebelum adanya PNPM MP dan Tahun 2015 setelah adanya PNPM MP Pada tingkat (*pra sejahtera*) Pada tahun 2007 masyarakat desa Banyutengah ada **148** keluarga dan pada tahun 2015 ada **115** keluarga terdapat penurunan, pada tingkat (*sejahtera I*) tahun 2007 ada **171** keluarga dan **154** keluarga ditahun 2015 terdapat penurunan, tingkat (*sejahtera II*) tahun 2007 ada **262** keluarga dan **286** keluarga ditahun 2015 terdapat peningkatan, tingkat (*sejahtera III*) tahun 2007 ada **96** keluarga dan **256** keluarga ditahun 2015 terdapat peningkatan, tingkat (*sejahtera III plus*) tahun 2007 ada **1** keluarga dan **12** keluarga ditahun 2015 terdapat peningkatan. Dari data diatas menunjukkan bahwa terjadi pergerakan tingkat kesejahteraan antara tahun 2007 ke 2015.

Pengangguran pada masyarakat Desa Banyutengah Tahun 2009 ada 168 orang dari jumlah penduduk 3.065, th 2010 ada 105 orang dari jumlah penduduk 2998, th 2011 ada 128 orang dari jumlah penduduk 3.065, th 2012 ada 125 orang dari jumlah penduduk 3.190, th 2013 ada

115 orang dari jumlah penduduk 3.230, th 2014 ada 115 orang dari jumlah penduduk 3.331, tahun 2015 ada 102 orang dari jumlah penduduk 3.298.

Dari data tersebut diketahui bahwa pada tahun 2009 ke th 2010 terdapat penurunan angka pengangguran sebesar 63 orang, hal itu juga dipengaruhi oleh angka jumlah penduduk yang berkurang sebesar 67 orang. pada tahun 2010 ke th 2011 terdapat peningkatan pengangguran sebesar 23 orang, namun hal itu juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang juga meningkat/bertambah dari tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar 67 orang, pada tahun 2011 ke 2012 terdapat penurunan angka pengangguran sebesar 3 orang, dan terdapat jumlah penduduk yang juga meningkat/bertambah dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 125 orang. pada tahun 2012 ke 2013 terdapat penurunan angka pengangguran sebesar 10 orang, hal itu juga dipengaruhi oleh angka jumlah penduduk yang berkurang sebesar 40 orang. Pada tahun 2013 ke 2014 terdapat persamaan pada angka pengangguran, namun terdapat penambahan 101 orang pada jumlah penduduk. Pada tahun 2014 ke 2015 terdapat penurunan angka pengangguran sebesar 13 orang, dan terdapat pertambahan penduduk sebesar 33 orang.

Artinya jika angka pengangguran menurun juga perlu dilihat jumlah penduduknya, jika penduduknya naik bisa jadi angka pengangguran juga ikut naik, jika jumlah penduduknya turun bisa jadi angka pengangguran ikut turun, namun tidak menutup kemungkinan jika terdapat persamaan dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya karena hal

itu dipengaruhi oleh lapangan pekerjaan yang sempit dan daya saing yang tinggi.

Terkait jumlah penduduk yang naik turun dikarenakan beberapa faktor yaitu: adanya angka kelahiran, adanya angka kematian, dan migrasi penduduk Desa Banyutengah menikah dengan penduduk lain dan berpindah, begitupun sebaliknya. Maka implementasi kebijakan PNPM di Desa Banyutengah dapat dikatakan efektif karena dapat menggerakkan tahapan keluarga ketingkat yang lebih tinggi.

2. Dampak PNPM MP pada masyarakat Desa Banyutengah jika dilihat dari segi Sosial-Ekonomi adalah :

Dampak PNPM MP pada masyarakat Desa Banyutengah jika dilihat dari segi Sosial-Ekonomi adalah: Ekonomi: Pergerakan pada angka Pengangguran pada masyarakat Desa Banyutengah Jika dikaitkan dengan PNPM MP dari tahun 2009 sampai tahun 2015 dapat dikatakan bahwa PNPM MP dapat mengurangi angka pengangguran pada masyarakat Desa Banyutengah, meskipun angka yang berkurang tidak begitu signifikan namun tetap ada pergerakan angka dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2013 ke tahun 2014 yang angka pengangguran masih tetap, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat desa, peningkatan penghasilan perbulan antara sebelum dengan sesudah adanya PNPM MP bahkan dari yang tidak memiliki penghasilan perbulan sebelum adanya PNPM MP berubah mendapatkan penghasilan perbulan setelah adanya PNPM MP, melalui usaha-usaha

